

PENGARUH KINERJA DPRD TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT/KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHAN KOTAWARINGIN BARAT 3 PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tuslam Amirudin
Syamsuri

Abstrak.

Tingkat kepuasan masyarakat/konstituen terhadap kinerja DPRD Kotawaringin Barat terutama di daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Periode 2014-2019 ditentukan oleh kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan dokumentasi. Penarikan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dan Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Uji Normalitas untuk diketahui normal atau tidak normalnya distribusi data melalui *Kolmogorov Smirnov Test* dan untuk menguji hipotesis menggunakan analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian dan analisis data diketahui Terdapat pengaruh atas Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 dengan perhitungan regresi berganda diketahui $Y' = 5.975,074$.

Kata Kunci : Kinerja, Kepuasan, Masyarakat/Konstituen.

**A. Latar Belakang **

Era reformasi pasca momentum bersejarah 1998, membawa implikasi yang luas pada berbagai aspek kehidupan terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Iklim demokrasi pun mengalami perubahan yang secara simultan dan saat ini telah membawa implikasi pula pada perubahan serta perkembangan sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan di daerah. Adanya perubahan tersebut menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, secara kontinyu dituntut masyarakat untuk memiliki kemampuan menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasari atas keinginan masyarakat agar DPRD dapat memberikan perhatian, menampung dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD yang nyata dan berkualitas.

Mengenai posisi kelembagaan DPRD dalam pemerintahan daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: “*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*”.

Kelembagaan DPRD yang notabene sebagai *output* dari sebuah proses politik yakni pemilihan umum (pemilu) dewasa ini banyak menjadi perhatian dan sorotan publik. Banyak elemen masyarakat mempertanyakan kinerja DPRD dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan sistem pemilu yang telah berlangsung demokratis, lembaga DPRD seolah telah menjadi tumpuan yang luar biasa atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Karenanya, di setiap periode lima tahunan, yakni saat pemilu legislatif digelar, masyarakat menaruh ekspektasi atau harapan yang begitu besar. Sehingga, seiring berjalannya waktu selama periode jabatan sebagai wakil rakyat, DPRD secara kelembagaan maupun personal anggota DPRD dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat/konstituennya.

Hanya saja, tidak semua ekspektasi atau harapan masyarakat itu dapat terpenuhi. Terdapat beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsinya yakni sebagai berikut :

Pertama: Pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda); banyak perda yang dihasilkan diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif daripada lembaga legislative. Padahal sebagai lembaga legislatif semestinya DPRD dapat melaksanakan fungsi legislasinya secara maksimal untuk memprakarsai terbentuknya peraturan daerah (perda). Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, DPRD dimungkinkan untuk memprakarsai lahirnya perda melalui hak inisiatif yang dimilikinya. Tentu saja dengan mengedepan kebutuhan masyarakat dan daerah dalam menginisiasi perda apa yang akan diusulkan.

Kedua: Fungsi anggaran yang dimiliki lembaga DPRD dirasakan kurang dalam membahas APBD yang berpihak kepada rakyat, hal tersebut dapat dilihat dari sisi pendapatan yang masih sangat mengandalkan sumbangan/pemberian dana perimbangan dan bagi hasil dari pemerintah pusat. Seharusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan patokan bagi kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pada faktanya PAD masih jauh dari harapan untuk mengimbangi keperluan

belanja daerah. Kemampuan dan kreatifitas dalam menggali potensi daerah masih perlu dioptimalkan lagi.

Ketiga: Dalam melakukan fungsi pengawasan; DPRD dipandang lemah dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta masih terdapat peraturan daerah (perda) yang belum berjalan secara efisien dan efektif yang semestinya perlu dikaji dan dievaluasi oleh DPRD. Selain itu juga perlu peran aktif yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui kinerja DPRD. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengawasan yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan perda serta ketentuan perundang-undangan lainnya oleh pemerintah daerah.

Terhadap ketiga fungsi tersebut diatas, wajar apabila kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap kinerja DPRD dan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat, terutama konstituen di daerah pemilihannya, yakni: apakah kebijakan-kebijakan yang di hasilkan oleh DPRD telah memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat (publik)? bagaimanakah kinerja DPRD dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? adakah kinerja DPRD berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat/konstituen terutama pada daerah pemilihan mereka?

DPRD dalam menjalankan perannya memiliki kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah. Sepatutnya DPRD harus dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang dimaksud di atas untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang duduk dalam parlemen, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi dan harapan mampu menampung aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Berbagai persoalan kemasyarakatan berada di pundak anggota DPRD dan masyarakat senantiasa menantikan hasil kinerja dalam penyelesaian setiap persoalan tersebut.

Selanjutnya, dengan merunut pada ketentuan formal perundang-undangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Pada posisi ini sebenarnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DPRD sebagai lembaga yang memiliki integritas untuk memutuskan dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Artinya, aspirasi masyarakatlah sebagai sumber *input* dan dasar dalam memformulasikan kebijakan daerah bersama eksekutif. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Riant Nugroho: 183).

Fakta empiris menunjukkan, masyarakat/konstituen di daerah pemilihan menaruh

harapan yang sangat tinggi terhadap lembaga DPRD maupun personal anggota DPRD. Bahkan seakan melebihi kapasitas kelembagaan DPRD maupun personal anggotanya. Hal tersebut juga lantaran masih belum semua, atau bahkan sebagian besar masyarakat, belum memiliki persepsi pemahaman yang utuh atas keberadaan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Misalkan saja, dalam hal fungsi anggaran. Seringkali terdengar suara di masyarakat bahwa seolah-olah semua terkait anggaran, baik untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian dalam arti luas, keagamaan, sosial kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh DPRD yang dianggap sebagai corong suara masyarakat.

Dengan kondisi tingkat harapan masyarakat yang begitu besar atas kinerja DPRD maupun personal anggotanya itulah yang semestinya dapat direspon positif dengan upaya peningkatan kinerja dengan melaksanakan fungsi-fungsi DPRD secara optimal. Selama ini, masyarakat seringkali mengaku kecewa atas kinerja DPRD. Implikasi dari kepuasan itu, tentu saja bisa berdampak pada menurunnya nilai kepercayaan (*trust*) publik terhadap lembaga DPRD. Dampaknya, bisa saja memicu rasa antipati dan sikap apatis yang biasa ditunjukkan dengan semakin rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu yang digelar setiap lima tahunan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya (Supranto, 1997: 23).

B. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepuasan masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yakni sebuah proses penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka sebagai alat ukur untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibagi atas Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1), Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2), Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan (X_3) dengan variabel terikat yakni Kepuasan Masyarakat (Y)

Sampel dalam penelitian ini diambil dari Konstituen atau Masyarakat yang ada di Dapil 3 Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan memperhatikan jumlah konstituen yang ada di daerah pemilihan 3 Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena jumlah populasi sampel banyak, maka penulis menggunakan Teknik Sample yang dikembangkan oleh Isaac Michael dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yakni peneliti menetapkan 658 (enam ratus lima puluh delapan) orang masyarakat yang terdiri dari 230 (dua ratus tiga puluh) orang dari Kecamatan Pangkalan Lada, 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang dari Kecamatan Pangkalan Banteng, 170 (seratus tujuh puluh) orang dari Kecamatan Arut Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode kuesioner/angket dan metode Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Uji Normalitas untuk diketahui normal atau tidak normalnya distribusi data melalui *Kolmogorov Smirnov Test* dan uji ini dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai garis linear atau tidak (apakah hubungan

antar variabel yang ingin dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak) melalui Uji ini penting karena salah satu syarat pengujian *parametric test* (Uji Parametrik) adalah data harus linier. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisa regresi linier berganda. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui hubungan secara linier antara pengaruh kinerja DPRD terhadap kepuasan masyarakat/konstituen di daerah pemilihan Kotawaringin Barat 3. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). dengan menggunakan rumus perhitungan

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan

Y' = Variabel Dependen (Kepuasan Masyarakat pada Dapil 3)

X_1 dan X_2 = Variabel Independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2 \dots X_n = 0$)

b = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan ataupun Nilai Penurunan)

(Sugiyono, 2007)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam teknik analisis deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi Sugiyono (2012).

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) serta histogram, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Analisa Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X1	658	8	4	12	5433	8,26
X2	658	12	3	15	5214	7,92
X3	658	12	3	15	5266	8,00
Y	658	12	3	15	5262	8,00
Valid N (listwise)	658					

Dari data diatas memperlihatkan bahwa jumlah responden yang dijadikan sample sejumlah 658 (enam ratus lima puluh delapan) responden, dari jumlah tersebut pada variabel X_1 nilai responden terkecil adalah 4, pada variabel X_2 nilai responden terkecil adalah 3, pada variabel X_3 nilai responden terkecil adalah 3 dan pada variabel Y nilai responden terkecil adalah 3,

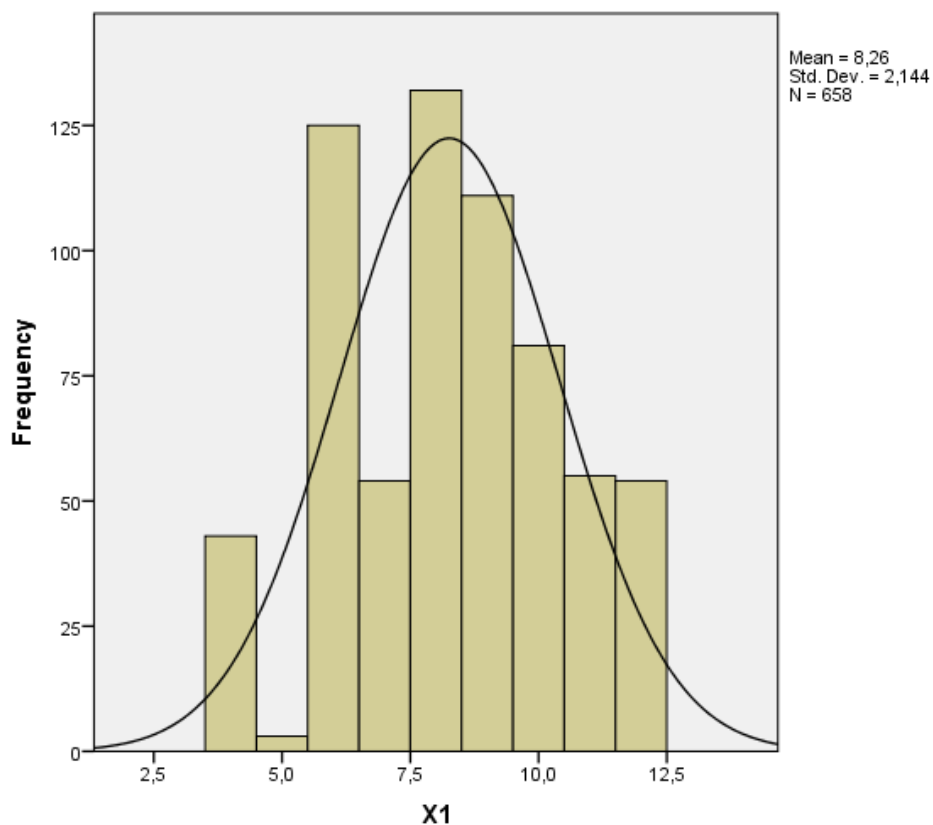
Tabel Analisa Statistik Deskriptif (Lanjutan)

Descriptive Statistics						
------------------------	--	--	--	--	--	--

	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X1	2,144	4,596	-,081	,095	-,663	,190
X2	2,676	7,160	,464	,095	-,069	,190
X3	2,524	6,371	,325	,095	-,142	,190
Y	2,443	5,967	,284	,095	-,103	,190
Valid N (listwise)	658					

Pada perhitungan tabel diatas nilai rata-rata dari variabel X_1 8,26 dengan standar deviasi sebesar 2,144, nilai rata-rata dari variabel X_2 7,92 dengan standar deviasi sebesar 2,676, nilai rata-rata dari variabel X_3 8,00 dengan standar deviasi sebesar 2,524, nilai rata-rata dari variabel Y 8,00 dengan standar deviasi sebesar 2,443. Kolom Skewness dan Kurtois adalah ukuran untuk melihat distribusi data normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data dan Kurtois mengukur puncak dari data.

Berikut juga ditampilkan histogram dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hal tersebut untuk melihat normalitas data berdasarkan bentuk kurva, data akan dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang baik sisi kiri maupun kanan (Sujianto, 2007)

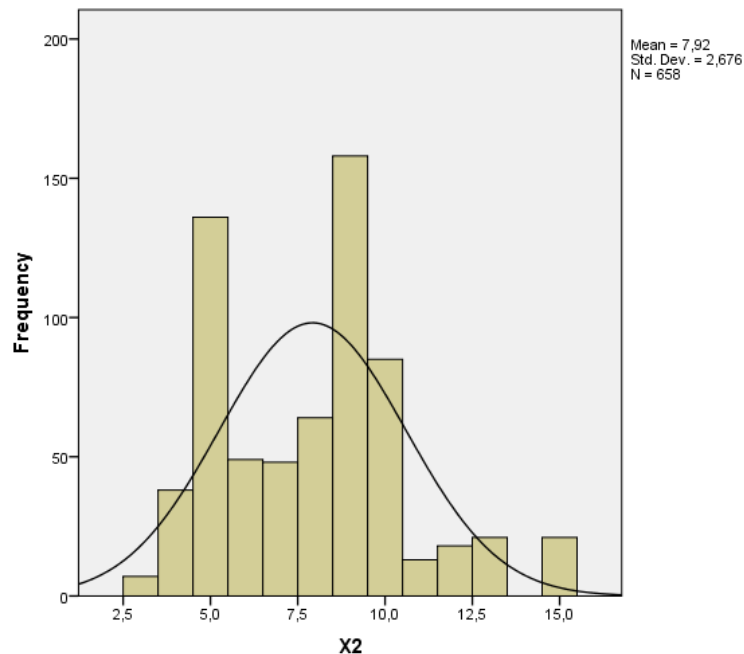


Gambar 4.2 Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi

Gambar diatas menjelaskan bahwa data variabel Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi dikatakan normal. Hal ini terlihat dari kurva yang cenderungimbang baik sisi kanan maupun sisi kiri. Indeks Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1) diketahui sebaran jawaban berkisar antara 2,5 s/d 12,5 dengan frekuensi berkisar 1 s/d 125 dari masing-masing jawaban responden. Untuk Distribusi dari data Variabel X_1 (Legislasi) ditampilkan dibawah ini:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel X_1 (LEGISLASI)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	43	6,5	6,5	6,5
	SANGAT SETUJU	3	,5	,5	7,0
	6	125	19,0	19,0	26,0
	7	54	8,2	8,2	34,2
	8	132	20,1	20,1	54,3
	9	111	16,9	16,9	71,1
	10	81	12,3	12,3	83,4
	11	55	8,4	8,4	91,8
	12	54	8,2	8,2	100,0
		Total	658	100,0	100,0

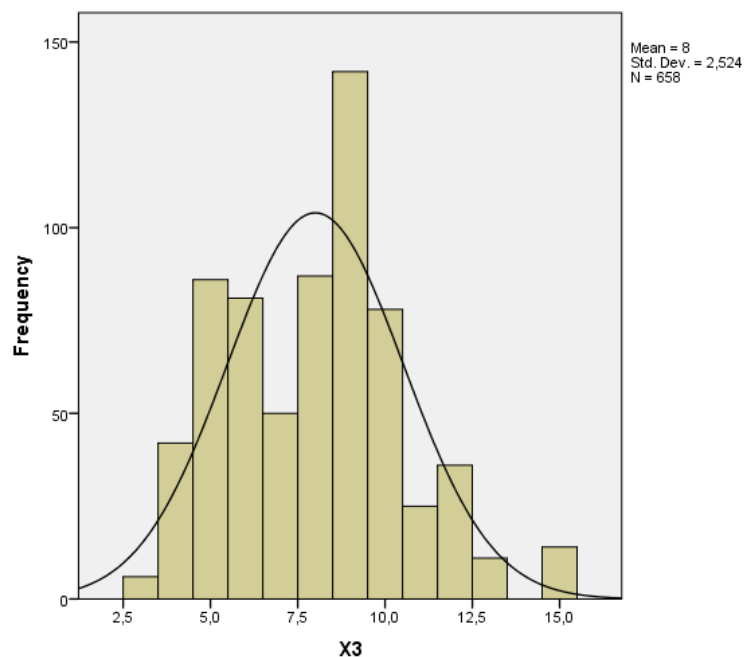


Gambar 4.3 Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran

Gambar diatas menjelaskan bahwa data variabel Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran dikatakan normal. Hal ini terlihat dari kurva yang cenderungimbang baik sisi kanan maupun sisi kiri. Indeks Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2) diketahui sebaran jawaban berkisar antara 2,5 s/d 15,0 dengan frekuensi berkisar 1 s/d 15 dari masing-masing jawaban responden. Untuk Distribusi dari data Variabel X_2 (Anggaran) ditampilkan dibawah ini:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel X2 (ANGGARAN)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KADANG-KADANG	7	1,1	1,1	1,1
SETUJU	38	5,8	5,8	6,8
SANGAT SETUJU	136	20,7	20,7	27,5
6	49	7,4	7,4	35,0
7	48	7,3	7,3	42,2
8	64	9,7	9,7	52,0
9	158	24,0	24,0	76,0
10	85	12,9	12,9	88,9
11	13	2,0	2,0	90,9
12	18	2,7	2,7	93,6
13	21	3,2	3,2	96,8
15	21	3,2	3,2	100,0
Total	658	100,0	100,0	



Gambar 4.4 Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan

Gambar diatas menjelaskan bahwa data variabel Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan dikatakan normal. Hal ini terlihat dari kurva yang cenderungimbang baik sisi kanan maupun sisi kiri. Indeks Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasn (X_3) diketahui sebaran jawaban berkisar antara 2,5 s/d 15,0 dengan frekuensi berkisar 1 s/d 150 dari masing-masing jawaban responden. Untuk Distribusi dari data Variabel X_3 (Pengawasan) ditampilkan dibawah ini:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel X3 (PENGAWASAN)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	KADANG-KADANG	6	,9	,9	,9
	SETUJU	42	6,4	6,4	7,3
	SANGAT SETUJU	86	13,1	13,1	20,4
	6	81	12,3	12,3	32,7
	7	50	7,6	7,6	40,3
	8	87	13,2	13,2	53,5
	9	142	21,6	21,6	75,1
	10	78	11,9	11,9	86,9
	11	25	3,8	3,8	90,7
	12	36	5,5	5,5	96,2
	13	11	1,7	1,7	97,9
	15	14	2,1	2,1	100,0
	Total	658	100,0	100,0	

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas data variabel (X_1), (X_2), (X_3) dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov Test* didapatkan angka probabilitas atau *Asymp.Sig (2-tailed)* Variabel (X_1) = 0.200, Variabel (X_2) = 0.098, Variabel (X_3) = 0.200 (Lampiran)

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- Nilai Sig. atau Signifikan/Probabilitas dengan ketentuan apabila nilai signifikan $< \alpha = 0.05$ memperlihatkan data tidak berdistribusi normal;
- Nilai Sig. atau Signifikan/Probabilitas dengan ketentuan apabila nilai signifikan $> \alpha = 0.05$ memperlihatkan data berdistribusi normal;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Variabel Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1), Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2), Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan (X_3) dapat dinyatakan normal, karena angka *Asymp.Sig (2-tailed)* semua variabel tersebut diatas $> \alpha = 0.05$.

3. Uji Linearitas

Uji Linearitas data variabel (X_1), (X_2), (X_3) dilakukan pada bagian *Deviation From Linearity* didapatkan angka probabilitas Variabel (X_1) = 0.736, Variabel (X_2) = 0.977, Variabel (X_3) = 0.284

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- Jika Sig. atau Signifikan pada *Deviation From Linearity* $> \alpha = 0.05$ maka hubungan variabel adalah linear;
- Jika Sig. atau Signifikan pada *Deviation From Linearity* $< \alpha = 0.05$ maka hubungan variabel adalah tidak linear;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dinyatakan linear karena nilai signifikansi lebih dari 0.05. selanjutnya data yang telah dinyatakan normal dan linear.

4. Analisis Data

Terhadap data yang telah dikumpulkan telah dilakukan analisa data menggunakan bantuan program komputer *Statistical Program for Social Science (SPSS) for Windows Release*, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,406	,523		10,341	,000
	X1	,310	,043	,272	7,222	,000
	X2	-,037	,034	-,041	-1,089	,277
	X3	,041	,036	,043	1,133	,258

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diformulasikan rumus sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y' = 5.406 + 0.310 X_1 - 0.037X_2 + 0.041X_3$$

Keterangan:

Y' = Kepuasan Masyarakat Pada Dapil 3

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃= Koefisien Regresi

X₁= Legislasi

X₂= Anggaran

X₃= Pengawasan

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 5.406 → jika Legislasi (X₁), Anggaran (X₂) dan Pengawasan (X₃) nilainya adalah 0, maka kepuasan masyarakat (Y) nilainya adalah 5.406;

b. Koefisien Regresi Variabel Legislasi (X₁) sebesar 0.310 → jika variabel independen lainnya tetap dan nilai variabel Legislasi mengalami kenaikan 1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0.310;

c. Koefisien Regresi Variabel Anggaran (X₂) sebesar -0.037 → jika variabel independen lainnya tetap dan nilai variabel Anggaran mengalami penurunan 1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar -0.037;

d. Koefisien Regresi Variabel Pengawasan (X₃) sebesar 0.041 → jika variabel independen lainnya tetap dan nilai variabel Pengawasan mengalami kenaikan 1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0.041.

Nilai Kepuasan Masyarakat yang diprediksi (Y') dapat dilihat pada tabel Casewise Diagnostic (Kolom Predicted Value). Sedangkan Residual (Unstandardized Residual) adalah selisih antara Nilai Kepuasan Masyarakat dengan Predicted Value dan Std. Residual (Standardized residual) adalah nilai residual yang terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya jika menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi)

Dari hasil perhitungan terhadap kuesioner yang telah dibagikan, didapatkan hasil bahwa :

- 1) Nilai X₁ sebesar 1.811;
- 2) Nilai X₂ sebesar 1.738;
- 3) Nilai X₃ sebesar 1.753,33;

Nilai-nilai tersebut diatas kemudian dimasukkan ke dalam persamaan:

$$Y' = 5.406 + 0.310 X_1 - 0.037X_2 + 0.041X_3$$

$$\begin{aligned}
 &= 5.406 + 0.310 (1.811) - 0.037(1.738) + 0.041(1.755,34) \\
 &= 5.406 + 561,41 - 64,306 + 71,97 \\
 &= 5.975,074
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas akhirnya didapatkan nilai $Y' = 5.975,074$, angka tersebut memperlihatkan bahwa Nilai Kepuasan Masyarakat Pada Dapil Kotawaringin Barat 3 sebesar 5.975,074

a. Pengaruh Variabel (X_1) terhadap Variabel (Y)

Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang pertama adalah:

1.	Ho	=	Tidak ada pengaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
	Ha	=	Ada penaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1) dengan Kepuasan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Variabel X_1 dan Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,406	,523		10,341	,000
	X1	,310	,043	,272	7,222	,000
	X2	-,037	,034	-,041	-1,089	,277
	X3	,041	,036	,043	1,133	,258

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 1 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Regresi Tabel 4.4 sebesar 0.310 yang menyatakan ada korelasi atau pengaruh positif antara variabel X_1 dengan Y.

Tabel 4.10 Tabel Korelasi Variabel X_1 dan Y
Correlations

		X1	Y
X1	Pearson Correlation	1	,270**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	658	658
Y	Pearson Correlation	,270**	1

Sig. (2-tailed)	,000	
N	658	658

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pembuktian hipotesis pertama yang menyatakan ada korelasi secara signifikan antara variabel kinerja DPRD dalam fungsi legislasi (X_1) dengan kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut:

$$H_a : r_{yx1} \neq 0$$

$$H_0 : r_{yx1} = 0$$

Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien korelasi dua sisi (2-tailed) dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.000, karena probability dibawah maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X_1) mempunyai hubungan secara signifikan dengan Kepuasan Masyarakat (Y).

Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_1) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.73 atau 73% sedangkan sisanya 27% ditentukan oleh variabel lain.

b. Pengaruh Variabel (X_2) terhadap Variabel (Y)

Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang kedua adalah:

2.	Ho	=	Tidak ada pengaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
	Ha	=	Ada pengaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2) dengan Kepuasan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Analisis Variabel X_2 dan Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,406	,523		10,341	,000
	X1	,310	,043	,272	7,222	,000
	X2	-,037	,034	-,041	-1,089	,277
	X3	,041	,036	,043	1,133	,258

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 2 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Regresi Tabel 4.6 sebesar

-0.037 yang menyatakan tidak ada korelasi atau hubungan negatif antara variabel X_2 dengan Y.

Tabel 4.12 Tabel Korelasi Variabel X_2 dan Y
Correlations

		X2	Y
X2	Pearson Correlation	1	-,024
	Sig. (2-tailed)		,531
	N	658	658
Y	Pearson Correlation	-,024	1
	Sig. (2-tailed)	,531	
	N	658	658

Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 2 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Korelasi Variabel r_{x_2y} Tabel 4.4 sebesar -0.024 yang menyatakan ada korelasi atau hubungan yang rendah antara variabel X_2 dengan Y.

Pembuktian hipotesis kedua yang menyatakan ada korelasi secara signifikan antara variabel kinerja DPRD dalam fungsi anggaran (X_2) dengan kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut:

$$H_a : r_{yx1} \neq 0$$

$$H_0 : r_{yx1} = 0$$

Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien korelasi dua sisi (2-tailed) dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.531, karena probability diatas maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_2) tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan Kepuasan Masyarakat (Y).

Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_2) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.001 atau 1% sedangkan sisanya 99% ditentukan oleh variabel lain

c. Pengaruh Variabel (X_3) terhadap Variabel (Y)

Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang ketiga adalah:

3.	H_0	=	Tidak ada pengaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
	H_a	=	Ada pengaruh signifikan antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X_3) dengan Kepuasan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Tabel Regresi Variabel X₃ dan Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,406	,523		10,341	,000
	X1	,310	,043	,272	7,222	,000
	X2	-,037	,034	-,041	-1,089	,277
	X3	,041	,036	,043	1,133	,258

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 3 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan (X₃) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Regresi Tabel 4.8 sebesar 0.041 yang menyatakan ada korelasi atau hubungan positif antara variabel X₃ dengan Y.

Tabel 4.14 Hasil Analisis Variabel X₃ dan Y

Correlations

		X3	Y
X3	Pearson Correlation	1	,044
	Sig. (2-tailed)		,258
	N	658	658
Y	Pearson Correlation	,044	1
	Sig. (2-tailed)	,258	
	N	658	658

Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 3 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan (X₃) dengan Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Korelasi Variabel r_{x₃y} Tabel 4.9 sebesar 0.044 yang menyatakan ada korelasi atau hubungan yang rendah antara variabel X₃ dengan Y.

Pembuktian hipotesis ketiga yang menyatakan ada korelasi secara signifikan antara variabel kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan (X₃) dengan kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut:

$$H_a : r_{yx1} \neq 0$$

$$H_0 : r_{yx1} = 0$$

Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien korelasi dua sisi (2-tailed) dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.258 , karena probability diatas maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X₃) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.002 atau 2% sedangkan sisanya 98% ditentukan oleh variabel lain.

2. Pembahasan

1. Pengaruh Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi

(X₁) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi (X₁) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan 3 (Y) secara umum masuk dalam kategori yang cukup dilihat dari nilai korelasi sebesar 0.270. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X₁) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.73 atau 73% sedangkan sisanya 27% ditentukan oleh variabel lain.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 73% masyarakat pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 merasa kinerja anggota DPRD dalam fungsi legislasi telah berjalan dengan baik. Jika melihat hasil tersebut, dapat dipahami, bahwa angka 73 % merupakan angka persentase yang lumayan besar. Harapan atau ekspektasi masyarakat pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 atas kebutuhan mereka di bidang legislasi yang merupakan salah satu fungsi DPRD mencapai angka yang cukup signifikan.

Jika kita merunut pada Bab II di mana disebutkan bahwa Fungsi Legislasi atau Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah. Di sini lah, sebagaimana hasil penelitian yang penulis laksanakan, masyarakat secara umum merasa puas atas kinerja di bidang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dapat penulis uraikan di sini, angka 73 % kepuasan masyarakat di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3, karena masyarakat melihat bahwa, selama tiga tahun masa bakti yang telah dijalani, banyak produk hukum daerah berupa peraturan daerah (perda) yang dihasilkan telah sesuai aspirasi atau kebutuhan masyarakat dan daerah. Beberapa perda seperti perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), perda tentang retribusi sarang burung walet, perda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) serta perda-perda lain termasuk di antaranya, masih dipertahankannya Perda tentang larangan minuman beralkohol merupakan beberapa perda yang mendapat perhatian masyarakat.

Beberapa produk hukum daerah itu dianggap mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap lembaga DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Rata-rata masyarakat –yang secara riilnya dituangkan dalam hasil angket—berpandangan bahwa DPRD Kotawaringin Barat telah melaksanakan fungsinya di bidang legislasi secara efektif dan akuntabel. Apa yang menjadi isu sentral dan menjadi kebutuhan masyarakat disikapi oleh DPRD secara nyata dengan menetapkan beberapa perda tersebut. Baik, perda yang berasal dari pihak eksekutif (kepala daerah) maupun perda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan perda tersebut, maka persoalan yang ada di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai contoh, dengan adanya Perda Kota Layak Anak, maka saat ini, di wilayah Kotawaringin Barat semakin banyak tersedia tempat/ruang bermain

yang ramah anak. Misalnya, pembangunan taman kota, tersedianya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ramah anak dan lain sebagainya. Begitu pula Perda tentang Retribusi Sarang Burung Walet, di tengah semakin maraknya pembangunan sarang walet, dengan adanya perda tersebut, maka diharapkan semakin meningkat juga pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi sarang walet. Dengan demikian, masyarakat merasa, keberadaan bangunan-bangunan sarang walet tidak hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, namun juga ada manfaat yang diberikan bagi daerah.

Meski demikian, untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat/konstituen yang lebih maksimal lagi tentu juga masih ada variabel lain yang mempengaruhi. Berdasarkan perhitungan rumus di atas, masih terdapat sisa sebesar 27 % yang belum merasa puas.

Untuk sisanya sebesar 27 % tersebut dipengaruhi oleh variabel lainnya yakni :

1. Masih ada beberapa usulan masyarakat yang belum diakomodir dalam pembuatan peraturan daerah;
2. Masih ada beberapa hal di masyarakat yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

2. Pengaruh Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X_2) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X_2) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan 3 (Y) secara umum masuk dalam kategori rendah dilihat dari nilai korelasi sebesar -0.024. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_2) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.001 atau 1% sedangkan sisanya 99% ditentukan oleh variabel lain.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 99% masyarakat pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 merasa kinerja anggota DPRD dalam fungsi anggaran TIDAK berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh:

1. Alokasi anggaran yang belum tepat sasaran atas usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat;
2. Masih adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum diakomodir oleh anggota dewan dengan sebab keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan;
3. Masih ditemui adanya *bargaining-bargaining* politik atas pengalokasian anggaran yang dibahas oleh anggota dewan;

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa ada yang berbeda dengan hasil perhitungan nilai kepuasan masyarakat/konstituen pada fungsi legislasi. Selain ketiga faktor tersebut di atas yang menjadi penyebab rendahnya angka kepuasan masyarakat/konstituen, dapat penulis uraikan pula berdasarkan data-data empiris. Faktanya, dari berbagai ungkapan kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, juga disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme dalam proses penganggaran dan pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki lembaga DPRD.

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijelaskan tentang fungsi anggaran DPRD, yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, faktanya, masyarakat masih banyak belum memahami arti fungsi anggaran

tersebut. Masih ada anggapan, seolah-olah, berbagai kegiatan pembangunan, baik infrastruktur jalan, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan pertanahan dalam arti luas, itu semata-mata merupakan hasil penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat tidak memahami, bahwa itu semua merupakan hasil persetujuan bersama antara kepala daerah selaku pimpinan dari pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Artinya, peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran sejatinya telah dioptimalkan, hanya saja, belum difahami oleh masyarakat.

Selama ini, yang difahami sebagian besar masyarakat, bahwa kegiatan pembangunan itu merupakan anggaran yang dialokasikan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Misalnya, pembangunan jalan, berarti itu merupakan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Padahal, lembaga seperti dinas sebagai pembantu kepala daerah, sebagai eksekutor atau pelaksana dari kebijakan anggaran yang telah disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Sosialisasi tentang fungsi dan peran lembaga DPRD, seyogianya bisa diintensifkan lagi, agar ke depan, semakin baik pula pemahaman masyarakat tentang DPRD, sebagai lembaga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, yang merupakan representasi (perwakilan) masyarakat.

3. Pengaruh Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Pengawasan (X_3) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X_3) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan 3 (Y) secara umum masuk dalam kategori rendah dilihat dari nilai korelasi sebesar $r = 0.044$.

Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_3) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.002 atau 2% sedangkan sisanya 98% ditentukan oleh variabel lain.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 98% masyarakat pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 merasa kinerja anggota DPRD dalam fungsi pengawasan TIDAK berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh:

1. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum mengawasi jalannya pemerintah daerah;
2. Masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah masih berinisiatif sendiri dalam menjalankan pemerintahan tanpa menggandeng DPRD sebagai mitra dalam mengelola;

Jika melihat hasil perhitungan tersebut di atas, yang kesimpulannya, masyarakat di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3, tingkat kepuasannya sangat rendah atas kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan memang bisa dimaklumi. Membandingkan hasil tersebut dengan fakta empiris yang penulis dapatkan di lapangan, faktor pemahaman masyarakat atas implementasi fungsi pengawasan lembaga DPRD juga relatif masih rendah. Selain itu, fakta empirisnya, selama masa jabatan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2014-2019, belum ada implementasi secara konkret sebagai bentuk pengawasan secara formal kelembagaan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah.

Jika kita mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada

pasal 159, yang menyebutkan, DPRD kabupaten/kota mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Ketiga hak yang dimiliki DPRD, sesungguhnya merupakan alat bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut dalam melakukan pengawasan (*controlling*) kepada pemerintah daerah. Hak interpelasi, misalnya. Itu merupakan hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula hak angket, yang merupakan hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika selama periode berjalan, DPRD melaksanakan pengawasan melalui hak-hak kelembagaan yang dimiliki sebagaimana tersebut di atas, maka hal itu akan bisa dilihat dan diketahui masyarakat. Apalagi, jika didukung dengan publikasi yang massif dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun media sosial lainnya. Karena melalui cara itulah, bentuk pengawasan yang secara konkret dan formal bisa dilakukan oleh DPRD. Tidak hanya itu, gaungnya pun akan sampai secara luas kepada masyarakat, termasuk masyarakat di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Tanpa adanya gebrakan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat difahami jika persepsi publik/masyarakat pun hasilnya seperti tergambar dari hasil penelitian yang penulis sajikan di atas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hipotesis atas pengaruh kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2014-2019 terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 dengan mengacu rumusan masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh signifikan atas Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji Korelasi sebesar 0.574 yang secara umum masuk dalam kategori yang cukup tinggi. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_1) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.330 atau 33%.
2. Terdapat pengaruh, meskipun tidak signifikan, atas Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji Korelasi sebesar 0.394 yang secara umum masuk dalam kategori rendah. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_2) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.155 atau 15.5%.
3. Terdapat pengaruh, meskipun tidak signifikan, atas Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Hal

tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji Korelasi sebesar 0.314 yang secara umum masuk dalam kategori rendah. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X_3) dengan (Y) yang terlihat pada nilai R Square adalah sebesar 0.099 atau 9.9%.

4. Terdapat pengaruh atas Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Hasil perhitungan regresi berganda diketahui bahwa nilai Kepuasan Masyarakat Pada Daerah Pemilihan Kotawaringin 3 yakni $Y' = 5.975,074$. Nilai kepuasan tersebut di atas dipengaruhi oleh kepuasan terhadap masing-masing variabel yang mempengaruhinya, yaitu: Fungsi Legislasi; Fungsi Anggaran; dan Fungsi Pengawasan

E. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data-data yang diperoleh, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD agar lebih memperhatikan saran masukan dari masyarakat serta lebih memperhatikan hal-hal dan potensi yang dapat disusun menjadi peraturan daerah;
2. Untuk melaksanakan fungsi anggaran anggota DPRD agar lebih jeli dalam mempersiapkan alokasi anggaran atas usulan masyarakat. Demikian juga bahwa anggota DPRD untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat atas usulan anggaran dengan tetap mengacu pada ketentuan sistem perencanaan dan penganggaran.
3. Anggota DPRD agar lebih menegaskan lagi dan memperkuat posisi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Lembaga DPRD hendaknya dapat mendorong dan berperan aktif dalam upaya memberikan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja serta tugas dan fungsi lembaga DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto, dkk, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:.
- Arikunto, Suharsimi.2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka cipta.
- Atik dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dessler, Gary, 2000, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, PT. Perhalindo, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Gie, The Liang, 2009, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Jakarta
- Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai*

- Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74.*
- Hakim, Abdul. 2006. *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. JRBI. Vol 2. No 2. Hal: 165-180*
- I Made Wirartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol – UGM, Yogyakarta.
- Lupiyoadi, Rambat. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik*. Penerbit Salemba empat. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mardiasmo.2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*
- Margono ., 2007 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Masiud, Fuad. 2000. *Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Miles, Matthew, B., Huberman, M.,1994, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi, 2017, *Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru Dan Persepsi Peserta Didik Tentang Media Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas V Sekolah Dasar Se Kabupaten Seruyan*, Hal 40, Tesis, Universitas Palangkaraya, Tidak Dipublikasikan
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Graha Indonesia. Jakarta
- Putra, Fadilah, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* . Bandung :Alfabeta
- Supriatna, Tjahya.2001.*Akuntabilitas Publik*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Supranto. (1997). *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan untuk menaikkan pangsa pasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Toha, Suherman, 2007, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.